

---

## KAJIAN PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAMBI

Oleh:

**NURDIN**

Dosen STIE Muhammadiyah Jambi

### ABSTRAK

Penelitian ini mengambil judul *kajian Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi* dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari instansi terkait. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dimana variabel dependennya adalah PDRB. Adapun variabel independennya adalah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada APBD Propinsi Jambi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan Belanja Tidak Langsung sebesar 1 persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Propinsi Jambi sebesar 0,006 persen. Sementara setiap terjadi peningkatan Belanja Langsung sebesar 1 persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Propinsi Jambi sebesar 0,004 persen. Besarnya koefisien determinasi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Propinsi Jambi dipengaruhi oleh variabel independen sebesar 98,1 persen sementara untuk sisanya sebesar 1,9 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini. Analisis menghasilkan variabel independen secara bersama-sama maupun individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jambi. Secara parsial baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung berpengaruh positif dan signifikan pertumbuhan ekonomi Propinsi Jambi

**Kata kunci:** Belanja Daerah, Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, Pertumbuhan Ekonomi

### **PENDAHULUAN**

#### *Latar Belakang*

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah mengubah konsep dan kewenangan daerah yang terjadi selama ini yaitu dari sentralistik menjadi desentralistik. Undang-undang ini memiliki makna substansial dalam

---

pemberian kewenangan yang semula ditujukan atas dasar porsi kebijakan pusat yang menonjol dalam pembagian kewenangan pusat-daerah selanjutnya diarahkan menjadi kemandirian daerah dalam mengelola daerahnya termasuk kebijakan-kebijakan pembangunan di daerah.

Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan. Instrumen ini diharapkan berfungsi sebagai salah satu komponen pemicu tumbuhnya perekonomian suatu daerah. Peran pemerintah dapat dijalankan melalui pembelanjaan. Pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah *pertama* pembelian faktor-faktor produksi (*input*) dan pembelian produk (*output*), *kedua*, pengeluaran konsumsi pemerintah (belanja rutin) serta untuk investasi pemerintah (belanja barang modal). Data menunjukkan bahwa proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pada APBD Provinsi Jambi periode tahun 1996 sampai 2009 berfluktuasi. Rata-rata proporsi belanja langsung pada APBD Provinsi Jambi sebesar 52,76% sedangkan proporsi Belanja Tidak Langsung sebesar 47,24%. Belanja tidak langsung umumnya sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai sedangkan belanja langsung umumnya digunakan sebagai belanja modal. Besaran proporsi belanja daerah diharapkan dapat menjadi stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi utamanya belanja langsung sebagaimana dikemukakan oleh Suparmoko (2000) bahwa pengeluaran pemerintah merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa-masa yang akan datang.

#### Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Belanja Daerah Tidak Langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi Periode 1996-2009?
2. Bagaimana Pengaruh Belanja Daerah Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Periode 1996-2009?

#### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Belanja Daerah Tidak Langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Belanja Daerah Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi.

---

**KAJIAN PUSTAKA***Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang mana pengguna anggaran tersebut adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian Negara/Lembaga/satuan perangkat kerja daerah.

Pokok-pokok muatan peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dalam hal perencanaan dan penganggaran adalah bahwa pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran antara lain: (a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja, (b) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD atau APBD perubahan, (c) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

Dalam APBD terdapat struktur yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi merupakan satu kesatuan terdiri dari:

- a. Pendapatan Daerah, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- b. Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
- c. Pembiayaan Daerah, meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

---

### ***Peranan Pemerintah dalam Perekonomian***

Menurut Mangkusubroto (1995) dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan kedalam tiga golongan besar, yaitu :

1. Peranan alokasi, yaitu peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi.
2. Peranan distribusi, yaitu peranan pemerintah dalam usahanya untuk mendistribusikan pendapatan secara adil dan merata.
3. Peranan stabilisasi, yaitu peranan pemerintah dalam menciptakan stabilisasi ekonomi dan mencegah hal-hal yang mungkin dapat mengganggu stabilitas ekonomi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Menurut Soekirno (2005) pengeluaran pemerintah akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di masa yang akan datang. Alasannya adalah pengeluaran pemerintah yang salah satunya dipengaruhi oleh pajak akan mampu menyediakan jasa-jasa seperti pembangunan atau penyediaan infrastruktur, administrasi pemerintah dan daerah.

Suparmoko (2000) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan

- a. Investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa-masa yang akan datang.
- b. Selain itu pengeluaran pemerintah diharapkan langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat.
- c. Penghematan pengeluaran yang akan datang.
- d. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga kerja yang lebih merata.

### ***METODE PENELITIAN***

Penelitian ini menggunakan data sekunder runtun waktu (*time series*) periode 1996-2009 ditunjang studi kepustakaan Analisis menggunakan regresi dengan model:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana:

Y	=	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB, Proxy Pertumbuhan Ekonomi)
$\beta_0$	=	Konstanta regresi
$\beta_1$	=	Koefisien regresi faktor X1 (Belanja Tidak Langsung)
$\beta_2$	=	Koefisien regresi faktor X2 (Belanja Langsung)
$X_1$	=	Belanja Tidak Langsung
$X_2$	=	Belanja Langsung

---

e = Variabel pengganggu (error).

Apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak, dilakukan uji dengan uji  $R^2$ , Uji F dan Uji T.

### 1. Uji Determinan ( $R^2$ )

Uji  $R^2$  Digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan variabel dependen yang diterangkan oleh variabel independen, dengan rumus :

$$R^2 = \frac{\sum e_i}{(Y - \bar{Y})^2}$$

### 2. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui secara simultan seberapa besar tingkat signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat dengan formula:

$$F_h = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Dimana :

$F_h$  = Rasio  $F_{\text{-hitung}}$

$R^2$  = Koefisien determinan

k = Parameter

n = Jumlah sampel

Nilai  $F_{\text{-hitung}}$  dibandingkan dengan nilai  $F_{\text{-tabel}}$  pada derajat kebebasan (df) dengan tingkat keyakinan tertentu dengan keputusan sebagai berikut:

$F_{\text{-hitung}} > F_{\text{-tabel}}$  .....  $H_0$  ditolak

$F_{\text{-hitung}} < F_{\text{-tabel}}$  .....  $H_0$  diterima

### 3. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui secara parsial seberapa besar pengaruh tingkat signifikansi variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*). Nilai  $t_{\text{-hitung}}$  dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{\beta}{SE}$$

Dimana:

$\beta$  = Koefisien Regresi hasil estimasi

SE = Simpangan baku atau Standar Error

Nilai  $t_{\text{-hitung}}$  selanjutnya dibandingkan dengan nilai  $t_{\text{-tabel}}$  dengan keputusan sebagai berikut:

$t_{\text{-hitung}} > t_{\text{-tabel}}$  maka  $H_0$  ditolak

$t_{\text{-hitung}} < t_{\text{-tabel}}$  maka  $H_0$  diterima

---

### **HASIL PEMBAHASAN**

Melalui persamaan regresi menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 8.688 + 0.006X_1 + 0.004X_2 + e$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan Belanja Tidak Langsung sebesar 1 persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sebesar 0.006 persen. Sementara setiap terjadi peningkatan Belanja Langsung sebesar 1 persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sebesar 0.004 persen. Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis, dimana Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dari hasil penelitian juga diketahui besarnya koefisien determinan ( $R^2$ ) adalah 0,981 atau sebesar 98,1 persen yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi atau mampu dijelaskan oleh variabel independen sebesar 98,1 persen sementara untuk sisanya sebesar 1,9 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Belanja tidak langsung dan Belanja langsung, berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependent (*pertumbuhan ekonomi*), begitu pula berdasarkan uji parsial menunjukkan bahwa Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **KESIMPULAN**

1. Peningkatan Belanja Tidak Langsung sebesar 1 persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sebesar 0,006 persen. Sementara peningkatan Belanja Langsung sebesar 1 persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sebesar 0,004 persen. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dipengaruhi oleh variabel independen sebesar 98,1 persen sementara sisanya sebesar 1,9 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.
2. Baik secara simultan maupun parsial variabel independen berpengaruh positif dan signifikan.



---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim, Peraturan Pemerintahan RI No. 58 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- \_\_\_\_\_, 2000-2010. Jambi Dalam Angka, BPS Provinsi Jambi
- Arsyad, Lincolin. 1999. Ekonomi Pembangunan. Edisi Keempat. STIE YKPN. Yogyakarta
- Devas, Nick, dkk. 1989. Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Universitas Indonesia
- Insukindro, Mardiasmo, Wahyu Widayat, Wihana Kirana Jaya, Purwanto, Abdul Halim, John Suprihanto, Budi Purnomo, 1994. "Peranan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam usaha Peningkatan PAD", Laporan hasil penelitian KKD, FE-UGM, Yogyakarta.
- Mangkoesebroto, Guritno, 1998. Ekonomi Publik, BPFE, Edisi 3, Yogyakarta.
- Mudrajad, Kuncoro, 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah, Erlangga, Jakarta
- Reksoprayitno, Soediyono, 1997. Ekonomi Makro: Pengantar Analisis Pendapatan Nasional, Edisi Kelima, Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta
- Suhadak, Nugroho Trilaksono, 2007. Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Penyusunan APBD di Era Reformasi, Bayumedia Publishing, Malang
- Suparmoko. 2002. Ekonomi Publik : Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah. Edisi Pertama Andi, Yogyakarta
- Supranto, J. 2009. Statistik Teori Dan Aplikasi. Edisi Ke-Tujuh. Erlangga. Jakarta
- Tambunan, Michael P. 2000. Pembangunan Ekonomi 1. Edisi Kelima. Bumi Aksara. Jakarta
- Todaro, M.P, 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Cetakan Keempat, Jakarta